©2025 Indonesian Journal of International Relations
Vol. 9, No. 1, pp. 80-96.
DOI: 10.32787/ijir.v9i1.644

PERANAN MILITER DALAM KONFLIK INTERNAL MYANMAR PADA TAHUN 2017-2022

The Role of Military in Myanmar's Internal Conflict In 2017-2022

Arya Adhi Saputra
Magister Hubungan Internasional
Universitas Katolik Parahyangan
Bandung, Indonesia
8092301004@student.unpar.ac.id

Elisabeth Dewi
Magister Hubungan Internasional
Universitas Katolik Parahyangan
Bandung, Indonesia
elisabeth.dewi@unpar.ac.id

INFO ARTIKEL
Article History

Received
1 January 2025

Revised
17 February 2025

Accepted
23 February 2025

Keywordsi:
bad leader; coup; intractable conflict, Min Aung Hlaing, military.

Kata Kunci:
pemimpin yang buruk; kudeta; konflik yang tak kunjung selesai; Min Aung Hlaing; militer.

Abstract

This study aims to explain how the role of the military has increasingly sharpened the internal conflict in Myanmar in 2017-2021 between the military government and ethnic minorities in Myanmar. For this purpose, qualitative research methods, document studies and literature are used. To strengthen the analysis, the concept of bad leaders and the concept of intractable conflict are used. The results of the study show that the Myanmar military is the main actor that prolongs the conflict, or the main factor in creating and maintaining intractable conflict in Myanmar. The strong role and ambition of Min Aung Hlaing as the military leader in leading the coup is to return Myanmar to a military authoritarian state. In conclusion, as long as the Tatmadaw does not relinquish power, and there is no effective international pressure, this conflict is likely to remain in a stalemate phase with a prolonged deadlock.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peranan militer yang semakin mempertajam konflik internal di Myanmar pada 2017-2021 antara pemerintah militer dengan etnis minoritas yang ada di Myanmar. Untuk itu digunakan metode penelitian kualitatif, studi dokumen dan kepustakaan, Untuk memperkuat analisis, digunakan konsep *bad leader* dan konsep *intractable conflict,* Hasil penelitian menunjukkan militer Myanmar adalah aktor utama yang memperpanjang konflik, atau faktor utama dalam menciptakan dan mempertahankan konflik *intractable* di Myanmar. Peran dan ambisi yang kuat dari Min Aung Hlaing selaku pemimpin militer dalam memimpin kudeta adalah untuk mengembalikan negara Myanmar ke dalam negara otoriter militer. Simpulannya, selama Tatmadaw tidak melepas kekuasaan, dan tidak ada tekanan internasional efektif, konflik ini kemungkinan akan tetap berada dalam fase *stalemate* dengan *deadlock* berkepanjangan.

ISSN: 2548-4109 electronic
ISSN: 2657-165X printed

PENDAHULUAN

Berlokasi di Asia Tenggara, Myanmar, sebelumnya dikenal dengan sebutan Burma, beribu kota Yangon merupakan negara berbentuk republik. Pada 18 Juni 1989, pemerintah Junta Militer mengubah sebutan terhadap negara yang dihuni 135 etnis ini menjadi Myanmar. Masyarakat dari etnis Myanmar memiliki berbagai latar belakang yang kemudian terbelah menjadi penduduk mayoritas dan minoritas. Salah satu penduduk minoritas adalah etnis muslim Rohingya. Mereka kurang mendapat perhatian negara bahkan tersisihkan dari etnis yang lain. Lemahnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap etnis Rohingya, sehingga diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap mereka secara terbuka yang didukung oleh sebagian besar massa fanatik pemerintah Junta militer, kerap terjadi (Keling, 2010).

Sementara untuk etnis mayoritas dari masyarakat Myanmar adalah etnis Buddha Bamar yang kebanyakan dari mereka merupakan elit politik dan juga kalangan Militer. Dari sejak Perang Kemerdekaan, Tentara Kemerdekaan Burma merupakan cikal bakal dari tentara Angkatan bersenjata Myanmar yang sekarang disebut sebagai Tatmadaw. Pasukan tersebut memperoleh kekuasaan melalui cara kudeta dan memerintah negara selama hampir 50 tahun. Tatmadaw juga menyebut dirinya sebagai pendiri bangsa dan perwujudan asli dari masyarakat asli Burma. Dengan ideologi ultranasionalis, mereka juga melihat bahwa kelompok minoritas adalah ancaman dan tidak pantas berada di Myanmar, sehingga harus dihilangkan atau diamankan. Oleh karena itu beberapa etnis minoritas termasuk Rohingya menjadi korban kebrutalan dari militer (BBC, 2022).

Perilaku kekerasan yang diterima oleh etnis Rohingya yang membuat konflik ini menjadi semakin memanas. Kekerasan tersebut seperti perusakan tempat tinggal, pemerkosaan terhadap perempuan, bahkan hingga pembantaian terhadap pembatasan hak asasi manusia seperti hak untuk bekerja dan sulitnya untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak. Banyaknya korban dari peristiwa ini kemudian menjadikan etnis Rohingnya memutuskan untuk meninggalkan Myanmar dan melarikan diri dengan melakukan mobilisasi besar besaran ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara (OCHA , 2019).

Pada tahun 2020, krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar ini kembali memanas dengan adanya kudeta Tatmadaw terhadap kepemimpinan Aung San Suu Kyi pada awal 2021. Sejak kudeta

tersebut, junta militer Myanmar yang dikepalai oleh Min Aung Hlaing telah menargetkan kelompok anti-militer di Myanmar termasuk Rohingya (Robbie, 2022). Setelah melakukan kudeta, pemimpin junta militer mengumumkan keadaan darurat dan mereka menjanjikan pemilihan umum yang bebas dan adil di masa yang akan datang.

Masyarakat yang tidak sepaham dengan kepemimpinan Min Aung Hlaing, membentuk kelompok pembangkangan sipil yang kemudian mengorganisir aksi massa, kemudian milisi lain seperti pasukan pertahanan rakyat melakukan serangan kepada konvoi militer dan juga membunuh pejabat. Akibat hal tersebut pimpinan junta militer melakukan eksekusi kepada empat aktivis secara rahasia. Mereka dituduh membantu pemberontak untuk melawan tentara Myanmar, mereka adalah pegiat demokrasi Kyaw Min Yu, yang lebih dikenal sebagai Ko Jimmy, dan mantan anggota parlemen dan artis hip-hop Phyo Zeya Thaw (BBC, 2022).

Buruknya kepemimpinan junta militer dan juga rasa benci dari militer terhadap kepemimpinan Aung San Suu Kyi yang dianggap sebagai "ibu", serta perubahan konstitusi yang dilakukan Aung San Suu Kyi yang dianggap melemahkan militer, membuat situasi menjadi semakin memanas. Dengan adanya penundaan hasil pemilihan umum pada tahun 2020, ditundanya sidang parlemen serta ditangkapnya Aung San Suu Kyi, membuat kekuatan militer menjadi semakin kuat di negara tersebut, yang awalnya ingin dilemahkan oleh Aung San Suu Kyi. Militer juga tak segan membunuh orang orang yang menentang terjadinya kudeta dan telah menahan lebih dari 11.000 orang untuk disiksa (Ganesan, 2022).

Jika melihat kekuatan militer yang ingin "dilemahkan" oleh Aung San Suu Kyi, hal ini bisa dilihat pada tahun 1980 dahulu, bahwa kekuatan Tatmadaw sebesar 200.000 ribu orang. Kekuataan tersebut bertambah hingga 400.000 ribu orang pada tahun 1990an namun jumlah tersebut masih belum cukup untuk mendominasi negara Myanmar. Pada saat Aung San Suu Kyi berkuasa jumlah tentara dikurangi, dan setelah kudeta terjadi jumlah tersebut terus berkurang akibat banyaknya anggota yang desersi atau membelot kepada pihak yang anti militer. Yang mana setelah kudeta kekuataan militer Tatmadaw hanya berkisar sebanyak 150.000 ribu orang (Selth, 2023).

Meskipun telah banyak penelitian yang menjelaskan mengenai konflik yang terjadi di

Myanmar, seperti dalam artikel jurnal yang berjudul "Respons dunia terhadap kudeta militer Myanmar" yang ditulis oleh Padlika Gamabar, dijelaskan bahwa kudeta yang terjadi disebabkan oleh militer yang mengambil kekuasaan dan menurut militer bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang sesuai dengan konstitusi Myanmar. Namun, responss dari dunia adalah untuk tidak ikut campur dalam permasalahan yang terjadi di internal suatu negara (Garmabar, 2021). Kemudian di dalam artikel jurnal yang berjudul "Implikasi konflik kudeta militer Myanmar terhadap sanksi internasional" yang ditulis oleh Riady Ibnu Khaldun, yang menjelaskan bahwa kudeta yang dilakukan oleh militer memberikan dampak buruk diberikannya sanksi oleh internasional kepada Myanmar seperti halnya sanksi ekonomi atau pun sanksi perdagangan internasional (Khaldun, 2021).

Kemudian dalam artikel jurnal yang berjudul "Sumber konflik perang sipil Myanmar pasca kudeta milter tahun 2021", yang ditulis oleh Indrasari, Annisa Febrianti Putri, Taufik Muhammad Ramadhan, and Prilla Marsingga. Dijelaskan bahwa konflik yang terjadi di Myanmar akibat adanya kudeta semakin tidak bisa diatasi karena beberapa hal seperti kebutuhan manusia yang tidak bisa dipenuhi yaitu adanya penderitaan, kemiskinan yang diderita masyarakat Myanmar dan diperparah dengan keterlibatan militer yang melakukan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap warga sipil dan memperparah terjadinya konflik, sehingga sulitnya mencapai perdamaian dan stabilitas keamanan yang berkelanjutan di Myanmar (Indrasari, 2023).

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya menurut penulis masih ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih rinci. Penelitian ini akan mengisinya dengan berfokus kepada peran dari Min Aung Hlaing dengan menggunakan konsep *Bad Leader* serta keterlibatan militer yang terjadi yang membuat konflik semakin berlarut dengan menggunakan konsep *Intractable Conflict*. Oleh karena hal tersebut, pertanyaan penelitian dalam penulisan ini yaitu "Bagaimana peranan militer yang semakin mempertajam konflik internal di Myanmar?"

KERANGKA ANALISIS

Penelitian ini menggunakan dua konsep dari Studi Hubungan Internasional untuk menjelaskan terjadinya dinamika konflik yang terjadi di Myanmar. Konsep pertama yang digunakan adalah *Bad leader* yang dikemukakan oleh Michael E Brown. Konsep tersebut merupakan faktor pemicu

dari konsep *Internal Conflict,* yaitu pertikaian yang mengandung unsur politik yang terkait dengan adanya angkat senjata, kekerasan yang disebabkan oleh faktor domestik dalam suatu negara dengan tidak melibatkan pihak luar. Konflik internal biasanya terjadi akibat adanya kemiskinan, bekas negara kolonial dan perpecahan yang terus menerus terjadi akibat adanya perebutan kekuasaan sehingga terciptanya perpecahan antarkelompok masyarakat (Bercovitch, 2011).

Konflik yang berasal dari dalam negeri, biasanya terjadi akibat adanya tindakan yang dilakukan oleh pemimpin untuk memicu konflik akibat ketidakselarasan pandangan atau ideologi dalam hal menjalankan suatu negara tersebut. Pemimpin yang buruk tersebut akan memicu konflik dengan menekan pergerakan masyarakat dari segala aspek yang ada baik ekonomi, politik, sosial dan akan memerangi para kelompok atau etnis masyarakat yang dianggap tidak selaras dan dianggap melawan pemerintah (Brown, 1996).

Pada kasus Myanmar, kepemimpinan yang buruk dilakukan oleh Min Aung Hlaing, dengan lebih mementingkan ambisi pribadi untuk meraih popularitas berpolitiknya. Namun, cara yang dilakukan adalah dengan melakukan kudeta militer dan membuat kekerasan kepada warga sipil yang menentang adanya aksi yang dilakukan oleh militer. Diikuti pula oleh keinginan untuk memenuhi tujuan dari ideologinya, yaitu keterlibatan militer atau Tatmadaw di dalam politik dalam negeri dan berusaha membuat negara terus berada dalam lingkup semi-demokratis.

Konsep yang kedua yaitu *Intractable Conflict,* yaitu konflik yang sulit diatur, keras kepala dan sulit untuk diselesaikan. Konflik ini menolak perubahan untuk penyelesaian yang terjadi secara tahun, dekade bahkan generasi. Situasi konflik ini juga dapat menyebabkan ancaman kesengsaraan baik keluarga, suku, bangsa dan hilangnya suatu negara (Goldman, 2006).

Sementara menurut Herdi Burgess, karakteristik dari konflik yang dianggap sebagai *Intractable* ada bermacam-macam. Pertama, adanya perbedaan moral yang tidak dapat didamaikan, hal ini bisa berasal dari perbedaan agama, budaya, suku dan juga pandangan yang berbeda. Kedua, yaitu permasalahan perebutan distribusi yang tinggi, dalam hal ini seperti perebutan sesuatu yang berharga, bisa seperti kekuasaan, dan sumber daya alam. Ketiga, konflik didominasi oleh suatu kelompok yang berada

di atas kekuasaan baik itu tingkatan sosial maupun politik (Burgess, 2003).

Di dalam konsep *Intractable Conflict* juga diperkenalkan dua konsep turunannya mengenai dampak yang dihadapi akibat adanya situasi konflik yang sulit untuk diselesaikan tersebut. Dampak yang pertama adalah situasi *Deadlock*, situasi tersebut diakibatkan adanya kondisi yang melibatkan pihak lawan, dalam hal ini tidak adanya kemajuan untuk berdamai terlihat mustahil akibat tidak adanya kemauan dari para pihak. Hal tersebut diakibatkan oleh ketidakpercayaan antara para pihak yang berkonflik pada saat melakukan mediasi. Hal ini dirasa akibat dari hasil akhir dari negosiasi atau mediasi tersebut yang menguntungkan pihak yang mana. Keuntungan tersebut diartikan siapa yang dapat mengakses atau memenangkan perebutan terhadap akses sumber daya alam dan juga ekonomi. Jika negosiasi atau mediasi yang dilakukan menggunakan pihak ketiga, para pihak juga merasa tidak percaya akibat adanya kemungkinan pihak ketiga tersebut akan berpihak kepada salah satu pihak yang sedang berkonflik tersebut (Barsoum, Kushbakov, Hollasch, Gambaryan, & Neuweiler, 2019).

Berbeda dengan *Deadlock*, situasi yang dapat menggambarkan suatu konflik yang sulit untuk diselesaikan adalah *Stalemate.* Situasi tersebut dicirikan dengan tidak ada pihak yang bisa menang dan tidak ada pihak yang ingin menerima kekalahan. Kebuntuan yang terjadi disebabkan oleh sumber daya yang habis akibat perang yang berbiaya tinggi. Situasi ini membuat para pemimpin dari pihak yang berkonflik tidak mau kehilangan muka mereka di hadapan publik akibat kesalahan yang mereka perbuat. Sehingga mereka akan lebih mementingkan kepentingan pribadi untuk mengamankan posisi mereka untuk kemudian hari. Oleh karena itu, konflik mencapai situasi yang dianggap menyakiti untuk para pihak yang berkonflik. Dengan demikian, jika *Stalemate* diartikan bahwa para pihak masih berbicara, namun tidak adanya solusi untuk mencapai kesepakatan damai dan *Deadlock* para pihak merasa tidak ada gunanya untuk berbicara atau negoisasi karena rasa frustrasi akibat perang yang dihadapi (Barsoum, Kushbakov, Hollasch, Gambaryan, & Neuweiler, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan kepustakaan terkait dengan fokus kajian, dan konsep atau teori sebagai referensi dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh kemudian diolah untuk mencari jawaban dari pertanyaan penelitian ini serta menghasilkan kesimpulan (Chih-Pei, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh militer kepada masyarakat yang tidak "sepaham" dengan ideologi militer sudah terjadi sejak lama. Sebagai contoh kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya di Myanmar yang menyebabkan terjadinya berbagai kekerasan, seperti pembakaran rumah, pembunuhan, pemerkosaan, dikarenakan etnis Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari Myanmar. Pada tahun 1977, Myanmar yang dahulu masih dikenal dengan nama Burma menjalankan Operation Dragon King di daerah masyarakat Rakhine. Rohingya, sebagai kaum minoritas, menjadi sasaran operasi, dianggap sebagai masyarakat ilegal dan dipaksa untuk pergi dari negara tersebut. Operation Dragon King ini melakukan berbagai penangkapan yang disertai dengan kekerasan sehingga menyebabkan banyak kematian, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak yang terus terjadi dari tahun ke tahun (Frontieres, 2022).

Pada tahun 1982, Myanmar menciptakan hukum kewarganegaraan baru yang bertujuan untuk "membuang" kaum Rohingya, hingga akhirnya terdapat lebih dari 250,000 kaum Rohingya dipaksa untuk keluar dari negara tersebut. Jika dianalisis dengan menggunakan konsep *Intractable Conflict,* yang pertama adalah adanya perbedaan moral yang sulit didamaikan. Dalam hal ini perbedaan etnis Bamar dengan Rohingya yang menjadi alasan konflik ini terus berlangsung. Adanya tindakan rasisme yang dilakukan terhadap Rohingya yang merupakan etnis minoritas. Kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer dengan dibunuh, diculik, diperkosa, eksekusi diluar hukum dan diusir secara paksa sehingga etnis ini dianggap harus hilang dari negara Myanmar untuk selamanya (Frontieres, 2022).

Pada tahun 2017, pasukan pembebasan Rohingya menyerang hampir 30 pos pengamanan yang berada di negara bagian Rakhine utara. Atas aksi ini militer Myanmar melakukan serangan balasan dengan menghancurkan rumah milik etnis Rohingya dan kematian ratusan etnis Rohingya (Juanda, 2021). Serangan balasan ini sangat terorganisir dan sistematis, tercatat 288 desa telah habis terbakar dan lebih dari 600.00 orang harus melarikan diri ke berbagai

negara. Jumlah tersebut diyakini adalah total populasi sebesar 80 persen dari etnis Rohingya yang kabur dari negara Myanmar akibat adanya penindasan dari Militer atau pun pemerintah (Juanda, 2021).

Adanya penindasan yang terus menerus dilakukan terhadap etnis Rohingya dan etnis minoritas lain di negara tersebut membuat mereka menjadi bersatu untuk menggulingkan rezim yang dianggap sebagai rezim illegal yang hanya mementingkan salah satu kelompok saja. Seperti yang dilakukan oleh Liga Kebangsaan Shan untuk Demokrasi yang merupakan partai etnis terkuat dengan berhasil memenangkan pemilihan umum pada tahun 2020 silam. Partai tersebut sangat setuju kepada para etnis minoritas untuk bersatu melawan kudeta atau melawan kepemimpinan diktator dari militer (Fawthrop, 2021).

Kudeta yang terjadi pada tahun 2021 berbeda dengan yang terjadi pada 1962 atau pun 1988 dan 2007. Dengan berkembangnya zaman dan juga media sosial yang semakin gencar membuat mudahnya melakukan akses informasi dan juga perhatian dari anak anak muda menjadi semakin luas. Dengan melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat luas tentang situasi yang terjadi sebenarnya. Para pendukung yang sangat loyal terhadap Aung San Suu Kyi sangat marah dengan adanya tindakan dari militer yang melakukan penangkapan yang tidak berdasar, dan mereka sangat menuntut aksi kejahatan perang dan pelanggaran HAM.

Di dalam analisis konsep *Intractable Conflict* yang kedua adalah adanya perebutan distribusi dalam hal ini seperti adanya perebutan kekuasaan yang terus menerus terjadi. Perebutan kekuasaan tersebut terjadi akibat adanya luka masa lalu atau pun rentetan sejarah terkait militer yang menganggap dirinya sebagai etnis mayoritas yang merupakan keturunan asli dari negara Burma. Perebutan kekuasaan yang terjadi sejatinya berakar dari adanya pembukaan angin segar dalam politik dengan diperbolehkannya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan juga membentuk pemerintahan sipil yang berdaulat. Transisi demokrasi ini dari sejak lama dikecam oleh pihak militer, seperti yang pernah militer lakukan pada tahun 1990. Pihak militer menolak hasil dari pemilihan umum yang memenangkan Aung San Suu Kyi yang kemudian memenjarakan dan mengambil alih kekuasaan yang ada di Myanmar (Firnas, 2023).

Atas dasar histori sejarah tersebut yang membuat masyarakat yang berasal dari etnis minoritas menentang tindakan represif yang dilakukan militer. Pengendalian

pemerintahan yang dikontrol langsung oleh militer sangat tercermin jelas dari kasus Myanmar tersebut. Pada akhir tahun 2003, Jenderal Khin Nyunt memberikan penjelasan bahwa peran utama militer dalam partisipasi negara dengan melakukan pemboikotan terhadap debat publik. Hal ini membuat rasa frustrasi kepada para partai politik etnis yang tidak memiliki ketidakmampuan terhadap hasil dari pemilihan umum misalnya. Namun, ketidakmampuan dari partai politik etnis ini bisa dikatakan tidak bisa berbuat banyak, sebab adanya referendum pada tahun 2008 yang membuat terus mengabadikan peran militer. Meskipun adanya pemilihan umum yang kredibel tetapi militer tetap ada dengan dijanjikannya 25 persen dari kursi legislatif dan berbagai jabatan di Kementerian yang sepenuhnya milik militer dan sepenuhnya militer tidak tunduk pada pemerintahan sipil yang ada (Bünte, 2011).

Kemudian untuk analisis konsep yang terakhir pada *Intractable Conflict* adalah konflik atas kekuasaan tersebut didominasi oleh satu kelompok masyarakat. Dominasi tersebut berasal dari tingkatan sosial dan politik yang begitu sangat kuat. Hal yang terjadi di Myanmar adalah etnis yang menjadi mayoritas di negara tersebut adalah etnis Buddha Bamar, dengan banyaknya elit yang ada di dalam etnis tersebut. Etnis Budha Damar menganggap dirinya adalah penguasa sehingga membuat etnis lain adalah "pengganggu" sehingga harus "dihilangkan" dari negara Myanmar (Harahap, 2022).

Sementara itu, pemimpin Rohingya menginginkan pemerintah Myanmar untuk mengakui tentang keberadaan etnis Rohingya sebagai suatu kelompok etnis yang memiliki hak kewarganegaraan di Myanmar dengan cara mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982. Namun hal tersebut ditolak oleh pemimpin Myanmar. Undang-Undang yang menjadi salah satu perdebatan masyarakat Rohingya tersebut menyatakan bahwa Myanmar sebagai sebuah negara memiliki sistem kewarganegaraan yang berstratifikasi dengan etnis yang harus diakui penuh oleh Myanmar untuk dapat menjadi warga negaranya. Hal ini dijelaskan oleh beberapa poin, yaitu: warga negara penuh yang diakui Myanmar merupakan masyarakat yang telah tinggal di Burma sebelum tahun 1823 atau memiliki orang tua yang telah menjadi warga negara Myanmar pada saat lahir; warga negara asosiasi merupakan masyarakat yang mendapatkan kewarganegaraannya dari Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Persatuan 1948; dan yang terakhir

merupakan warga negara naturalisasi yang merupakan masyarakat yang telah tinggal di Burma sebelum tanggal 4 Januari 1948 ataupun meminta kewarganegaraan setelah tahun 1982 (CNN, 2019).

Myanmar secara tidak langsung tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negaranya yang membuat masyarakat Rohingya memiliki kesulitan untuk memperoleh akses kesehatan hingga pendidikan. Secara geografis, penduduk Rohingya yang tinggal di Myanmar menetap di Rakhine yang terkenal akan sumber daya alamnya. Berdasarkan agama, etnis Rohingya yang hampir sebagian besar merupakan masyarakat yang menganut agama Islam, sedangkan Myanmar didominasi oleh masyarakat yang menganut agama Budhha. Melalui hal tersebut dapat dilihat bahwa konflik antara Myanmar dan kaum Rohingya belum siap untuk berlanjut ke penyelesaian konflik karena masing-masing pihak masih memiliki keinginan masing-masing dan keegoisan masing-masing. Dengan berada dalam kebuntuan yang cukup lama ini akan terus berdampak buruk bagi kedua pihak yaitu Myanmar dan Rohingya. Selain itu, belum adanya negosiasi yang dilakukan mempertimbangkan komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Myanmar dan Rohingya (Merdeka.com, 2016).

Buruknya Kepemimpinan Militer Min Aung Hlaing

Kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar dibawah perintah seorang Jenderal senior yang bernama Min Aung Hlaing, sebagai seorang Kepala Angkatan Bersenjata Myanmar. Min Aung Hlaing dianggap sebagai Jenderal senior yang memiliki pamor yang cukup kuat di militer Myanmar. Karir Min Aung Hlaing dimulai pada tahun 1970 dan terus memiliki karir yang cukup melesat sehingga menjabat sebagai pangilma tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar pada tahun 2011. Disamping berkarir di dunia militer Min Aung Hlaing juga memiliki latar belakang pendidikan hukum (Ashadi, 2022).

Kepemimpinan Min Aung Hlaing menjadi sorotan dalam kudeta Myanmar ini. Menurut panglima militer tersebut, para generasi muda Myanmar ditipu sehingga mendukung para pendukung anti-kudeta untuk menggulingkan kepemimpinan militer. Min Aung Hlaing menuduh media sebagai alat untuk menyebarkan propaganda yang menyesatkan dan memberikan narasi yang palsu terhadap kepemimpinan militer saat ini, dan menganggap para kelompok etnis yang

ingin menggulingkan pemerintah militer melakukan cara yang dapat menghancurkan nilai nilai persatuan berdasarkan nilai demokrasi dan federalisme. Menurut Min Aung Hlaing pula, wajib militer di Myanmar adalah keharusan bagi para pemuda pria yang berumur 18 hingga 35 tahun dan wanita yang berumur 18 hingga 27 tahun (Aljazeera, 2024).

Perubahan sosok Min Aung Hlaing yang merupakan tentara menjadi seorang politisi dan tokoh masyarakat dianggap sebagai "secara teratur dan perlahan". (Reuters, 2021) Ia sendiri merupakan orang yang tidak banyak bicara atau menonjolkan diri namun perubahan tersebut dimunculkan dalam publikasi dirinya yang menjadi sorotan. Penggunaan media sosial seperti Facebook untuk mempromosikan dirinya dengan memperlihatkan kegiatan seperti berkunjung ke biara dan pertemuan penting, dianggap pengamat dilakukan untuk menarik rasa simpatik masyarakat dengan semakin banyaknya pengikut di akun media sosialnya tersebut. Namun, akun tersebut dihapus karena serangan militer terhadap minoritas muslim Rohingya pada tahun 2017 (Reuters, 2021).

Setelah terjadinya kudeta pada tahun 2021, Min Aung Hlaing menganggap perlu melakukan perubahan untuk mengamankan posisinya sebagai pemimpin tertinggi di negara tersebut. Dengan mengurangi ketergantungannya terhadap militer dengan berupaya mendapatkan dukungan dari Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan dan tentunya menempatkan para loyalisnya di lingkungan strategis partai tersebut. Seperti Letnan Jenderal Myo Zaw Thein dan Letnan Jenderal Aung Soe yang ditempatkan di Partai Pembangunan Persatuan. Para prajurit militer juga didoktrin bahwa militer adalah satu-satunya penjaga dan pelindung ras agama Buddha dan menyatakan bahwa tanpa militer negara akan hancur dalam kekacauaan. Min Aung Hlaing memiliki kendali penuh atas rezim dan karir para militer bawahannya. Dalam hal ini, Min mengutamakan kesetiaan pribadi mengenai promosi pangkat dan penurunan pangkat secara tidak menentu (Khant, 2024).

Min Aung Hlaing memiliki kharisma yang kuat dalam karir militernya. Sebagai Jenderal senior tidak ada yang berani menolak perpanjangan darurat militer sejalan dengan perpanjangan masa kepemimpinannya sebagai pemimpin tertinggi di Myanmar. Persetujuan atas perpanjangan masa kepemimpinannya didapatkan dengan suara bulat (Firnas, 2023).

Walau sudah berusia 65 tahun yang menjadi usia prasyarat pensiun dari militer dan menjadi warga sipil, namun, ambisinya tidak berkurang. Apalagi ditunjang dengan situasi politik yang menguntungkannya, Min Aung Hlaing menolak hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dan menyatakan bahwa konstitusi bisa dicabut atau digantikan bila mana terjadinya kebuntuan politik yang berimbas pada gerak cepat Min Aung Hlaing untuk mengambil alih kekosongan jabatan (TheJakartaPost, 2021).

Dengan menggunakan konsep dari *Bad leader* dijelaskan bahwa ruang untuk dirinya maju dan merebut kekuasaan sangat memungkinkan. Karena adanya perbedaan pandangan dengan pemerintahan sipil, maka Min Aung Hlaing melakukan kudeta yang membuat mempertajam dan memanasnya kembali konflik di Myanmar dengan kepemimpinannya yang keras terhadap warga minoritas. Kudeta yang dilancarkan juga didasari oleh kepentingan pribadi Min Aung Hlaing akibat tidak adanya lagi cara menurut konstitusi yang membuat dirinya dapat menjadi orang nomor satu di Myanmar (Slodkowski, 2021).

Kepemimpinan buruk Min Aung Hlaing semakin memperkeruh konflik karena keberhasilan yang dia lakukan dengan melakukan kontrol atas rakyatnya. Melalui militer dengan mengeksploitasi secara represif, Min Aung Hlaing menggunakan isu nasionalisme, persatuan bangsa akan ras asli Myanmar (Bamar Buddha). Hal ini dilakukan untuk menjadikannya sebagai kekuatan agar dia tetap berada di lingkungan kekuasaaan. Min Aung Hlaing dianggap ingin mengembalikan Myanmar kepada kondisi otoriter yang telah terjadi di negara tersebut selama hampir 50 tahun lamanya. Kudeta yang dilakukan oleh militer membuat bersatunya para kelompok etnis minoritas untuk bersatu melawan rezim militer (Turnell, 2011).

Babak baru konflik antara Militer dengan etnis Rohingya

Konflik ini memberikan babak baru dalam dinamika permasalahan etnis Rohingya yang sejak lama sudah tertindas, dengan tidak adanya solusi dalam hal penyelesaian masalah terhadap akar penyebab dari ketidakpuasan yang dihadapi etnis minoritas. Situasi ini semakin memperburuk suasana yang ada. Rezim Militer yang didukung oleh pebisnis dan kalangan keluarga tentara yang kebanyakan adalah teknokrat, mampu membayar para pengunjuk rasa untuk pro terhadap kudeta militer. Cara-cara lain juga dilakukan dengan memenjarakan para biksu yang dianggap

terlalu vokal kepada militer. Organisasi Buddha Young Men's Buddhist Association dan Patriotic Monk Association diberikan dukungan logistik yang berlimpah agar mendukung aksi militer tersebut, pihak militer juga menggalang dukungan dengan membuat para biksu palsu yang berkhotbah agar para jemaatnya mendukung militer dalam waktu yang panjang (Thawnghmung, 2021).

Situasi yang terjadi membuat konflik ini semakin berlarut dan sulit untuk mencapai de-eskalasi atau menurunnya intensitas konflik. Sesuai dengan turunan dari konsep *Intractable Conflict,* bahwa situasi konflik di Myanmar menurut penulis dianggap menciptakan kondisi Deadlock, yang mana para pihak enggan untuk berbicara dengan duduk berbicara untuk mencapai De-eskalasi terhadap intensitas konflik tersebut akibat adanya rasa frustrasi akan konflik yang sedang dihadapi tak kunjung selesai atau menemukan kejelasan untuk damai. Rasa frustrasi juga akan dialami oleh para prajurit militer yang merasa bahwa struktur komando yang mereka pegang dirasa salah dan keluar dari hati nurani mereka, ini yang kemudian menciptakan banyaknya pendukung dari para masyarakat yang melakukan klaim anti pemerintah atau pun anti kepemimpinan militer

Sementara jika dilihat menggunakan konsep *Stalemate*, konflik Myanmar tidak bisa dikatakan *stalemate* karena para pihak enggan melakukan negosiasi karena rasa tidak percaya satu sama lain. Penindasan yang kejam dan berdarah terhadap para demonstran terus terjadi, ini mengakibatkan masa depan politik dan ekonomi Myanmar terancam sehingga menciptakan frustrasi di masa yang akan datang. Peran militer akan menentukan nasib dari Myanmar pada masa depan, cepat atau lembat persaingan antar otoriter dan demokrasi akan semakin memperkeruh suasana yang ada, karena adanya dua gagasan yang berbeda yaitu yang satu berdasarkan keinginan rakyat dan yang lainnya didasari akan kepentingan beberapa kalangan saja. Pengendalian kekuasaan diperlukan untuk menjaga aspek dari suatu negara, namun jika berkaca dari masa lalu bahwa suatu negara yang dipimpin oleh otoriter lebih mudah dihadapi dengan cara cara revolusi yang dilakukan oleh rakyat sehingga memunculkan peluang tersebut untuk melakukan revolusi. Berbeda dengan negara yang menganut demokrasi yang memiliki kepentingan yang sangat dinamis

dan saling bertentangan satu sama lain (Steinberg, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan konsep *Intractable conflict* dan turunannya yaitu *deadlock* dan *stalemate* serta menggunakan konsep *Bad Leader*, dapat dipahami bahwa militer Myanmar adalah aktor utama yang memperpanjang konflik, atau faktor utama dalam menciptakan dan mempertahankan konflik *intractable* di Myanmar. Selama Tatmadaw tidak melepas kekuasaan, dan tidak ada tekanan internasional efektif, konflik ini kemungkinan akan tetap berada dalam fase *stalemate* dengan *deadlock* berkepanjangan.

Prospek ke Depan: jika militer tetap berkuasa, konflik akan terus berlanjut dalam bentuk perang gerilya jangka panjang. Jika oposisi mampu bersatu, ada kemungkinan transisi politik, tetapi memerlukan dukungan internasional lebih kuat. Solusi diplomatik sulit dicapai, karena militer menolak negosiasi dengan kelompok yang menentangnya.

REFERENSI

OCHA . (2019). *Rohingya Refugee Crisis.*

Aljazeera. (2024, March 28). *Min Aung Hlaing talks tough as Myanmar's armed forces face growing pressure*. Retrieved from https://www.aljazeera.com/amp/news/2024/3/28/min-aung-hlaing-talks-tough-as-myanmars-armed-forces-hold-annual-parade

Ashadi, W. (2022). Kudeta Junta Militer Myanmar Terhadap Aung San Suu Kyi 2021. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs 7, no. 2* , 138-164.

BBC. (2022, February 3). *Myanmar: Mengapa militer, yang berjuluk Tatmadaw, begitu brutal dengan rakyat sendiri termasuk Muslim Rohingya?* Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60225717

BBC. (2022, July 25). *Myanmar: Who are the rulers who have executed democracy campaigners?* Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-asia-55902070

Bercovitch, J. a. (2011). *Unraveling Internal Conflicts in East Asia and the Pacific: Incidence, Consequences, and Resolution.* Lexington Books.

Brown, M. E. (1996). *The international dimensions of internal conflict.* Mit Press.

Bünte, M. (2011). Burma's Transition to'Disciplined Democracy': Abdication or Institutionalization of Military Rule? *GIGA*, 1-26.

Burgess, H. a. (2003). What are intractable conflicts. *Beyond intractability*. Retrieved from Beyond intractability: https://www.beyondintractability.org/essay/meaning_intractability

Chih-Pei, H. U. (2017). John W. Creswell, research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. *Journal of Social and Administrative Sciences, 4(2)*, 205-207.

Claire Q. Smith, S. G. (2021). Why Indonesia Adopted "Quiet Diplomacy over R2P in the Rohingya Crisis : The Roles of Islamic Humanitarianism, Civil–Military Relations, and Asean. 158-185.

CNN. (2019, July 28). *Negosiasi Soal Kewarganegaraan Rohingya Masih Buntu*. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190728232726-113-416289/negosiasi-soal-kewarganegaraan-rohingya-masih-buntu

Dalia Barsoum, I. K. (2019). Breaking Deadlocks: Peace Process Support. *Berghof foundation*, 27-33.

Fawthrop, T. (2021, February 27). *The Diplomat*. Retrieved from Myanmar's Ethnic Groups Join Together to Reject Military Rule: https://thediplomat.com/2021/02/myanmars-ethnic-groups-join-together-to-reject-military-rule/

Firnas, M. A. (2023). "Krisis Politik Myanmar: Masa Depan Demokrasi Pasca Kudeta Militer dan Peran Indonesia. *Intermestic: Journal of International Studies 7, no. 2* , 600-617.

Frontieres, M. S. (2022, August 24). *A timeline of the Rohingya crisis*. Retrieved from https://www.doctorswithoutborders.org/latest/timeline-visual-history-rohingya-refugee-crisis

Ganesan, N. (2022). The February 2021 Military Coup in Myanmar: Its Impact on Domestic Politics and Foreign Policy. *A Hiroshima Approach to Peace Studies: HPI Public Lecture Series Report 2022*, 3-16.

Garmabar, P. (2021). Respons Dunia Terhadap Kudeta Militer Myanmar. *Review of International Relations*, 179-188.

Goldman, J. S. (2006). How humiliation fuels intractable conflict: The effects of emotional roles on recall and reactions to conflictual encounters. *Teachers College, Columbia University*.

Harahap, D. (2022, May 28). *Kumparan*. Retrieved from Politik Identitas Pada Etnis Rohingya di Myanmar: https://kumparan.com/delvira-harahap/politik-identitas-pada-etnis-rohingya-di-myanmar-1yA2IJACbyn/full

Indrasari, A. F. (2023). Sumber Konflik Perang Sipil Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021. *Journal of Integrative International Relations*, 98-114.

Juanda, O. (2021). Myanmar Military Forces Atrocities Against the Rohingya under International Criminal Law. *NEGREI: Academic Journal of Law and Governance 1, no. 2*, 111.

Keling, M. F. (2010). A Historical Approach to Myanmar's Democratic Process. *Journal of Asia Pacific Studies*.

Khant, N. M. (2024, December 14). *Myanmar's Min Aung Hlaing struggles for political longevity*. Retrieved from eastasiaforum: https://eastasiaforum.org/2024/12/14/myanmars-min-aung-hlaing-struggles-for-political-longevity/

Khladun, R. I. (2021). Implikasi Konflik Kudeta Militer Myanmar Terhadap Sanksi Internasional. *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*.

Merdeka.com. (2016). *Apa sebenarnya penyebab Myanmar menindas Muslim Rohingya?* Retrieved from https://www.merdeka.com/dunia/apa-sebenarnya-penyebab-myanmar-menindas-muslim-rohingya.html

Ramsbotham, O. (2005). "The analysis of protracted social conflict: a tribute to Edward Azar." . *Review of International Studies 31*, 109-126.

Reuters. (2021, February 1). *All eyes on Myanmar army chief Min Aung Hlaing as military seizes power*. Retrieved from Reuters: https://www.reuters.com/article/world/all-eyes-on-myanmar-army-chief-min-aung-hlaing-as-military-seizes-power-idUSKBN2A119W/

Robbie, A. S. (2022, March 22). *The U.S. Has Recognized Myanmar's Genocide. But Is That Enough?* Retrieved from Foreign Policy: https://foreignpolicy.com/2022/03/24/myanmar-genocide-rohingya-us-recognition/

Selth, A. (2023, December 6). *Military manpower has become a critical factor for Myanmar's junta*. Retrieved from Australian Strategic Policy Instute: https://www.aspistrategist.org.au/military-manpower-has-become-a-critical-factor-for-myanmars-junta/

Setiawan, A. &. (2019). Role of Indonesian humanitarian diplomacy toward Rohingya crisis in Myanmar. *In Proceedings of the 2nd International Conference on Social Sciences.* Jakarta: EAI.

Slodkowski, A. (2021, February 2). *Newsmaker: Ambitious but cornered, Myanmar army chief took full power*. Retrieved from https://www.reuters.com/article/world/newsmaker-ambitious-but-cornered-myanmar-army-chief-took-full-power-idUSKBN2A139A/

Steinberg, D. I. (2021). *The military in Burma/Myanmar: On the longevity of Tatmadaw rule and influence.* ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Thawnghmung, A. M. (2021). Myanmar's military coup and the elevation of the minority agenda? *Critical Asian Studies, 53(2)*, 297-309.

TheJakartaPost. (2021, February 1). *Min Aung Hlaing: Myanmar's powerful, ambitious army chief*. Retrieved from https://www.thejakartapost.com/index.php/seasia/2021/02/01/min-aung-hlaing-myanmars-powerful-ambitious-army-chief-.html

Turnell, S. (2011). Myanmar's fifty-year authoritarian trap. *Journal of International Affairs* , 79-92.

Zartman, W. (2008). Ripeness: the importance of timing in negotiation and conflict resolution. *E-International Relations*, 20.